

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah dunia adalah sejarah orang muda, jika angkatan muda mati rasa maka matilah sebuah bangsa, (Pramoedya Ananta Toer, 1980). Perubahan wilayah adalah dampak dari gerak sosial yang dimotori oleh pemuda, gerak sosial itu sendiri membentuk ruang-ruang baru secara alamiah dari hasil interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga interaksi tidak terlepas dari aktivitas manusia. Menurut Ali Syari'ati dalam buku Sosiologi Islam (2011) menjelaskan bahwa faktor penggerak perubahan masyarakat tidak terlepas dari mazhab antara lain kelompok yang tidak menganggap sejarah sebagai acuan perubahan, kedua adalah kelompok anarkisme yang berpendapat bahwa setiap peristiwa adalah kejadian yang tidak disengajai, yang ketiga aliran materialisme yang berpendapat bahwa individu tidak memiliki pengaruh atas nasib masyarakat, yang keempat kelompok yang menyembah tokoh, terbagi menjadi dua yakni kelompok pemuja pahlawan dan kelompok penyembah tim elite.

Dalam kehidupan bernegara tentu politik merupakan unsur terpenting, sebab berdirinya sebuah Negara adalah hasil dari Revolusi Politik, dan juga manusia adalah hewan politik (Aristoteles''La Politica''cetakan visimedia 2007). Menurut (Aristoteles''La Politica''cetakan visimedia 2007), politik berasal dari kata Polis yaitu kota atau perkumpulan yang bukan hanya sebatas perkumpulan semata namun politik sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan bersama,

maka dari itu politik menjadi alat untuk mencapai keadilan. Begitu pula interaksi politik, ia merupakan kepentingan yang selalu ada dan beriringan dengan kekuasaan pemerintah demi mengeruk potensi Ekonomi.

Identifikasi merupakan proses pengenalan atau penempatan objek atau individu pada kelas sesuai dengan karakteristik tertentu, Bactiar (2012). Poerdawardaminta (2007) berpendapat bahwa identifikasi merupakan proses penentuan atau penetapan seseorang atau benda. Perkembangan perkotaan juga barang tentu dapat dilihat pada pertumbuhan penduduk yang kemudian berkembang menjadi komunitas. Perkotaan bertumbuh dengan corak yang berbeda beda tergantung pada kondisi geografi sebuah wilayah, sementara struktur ruang kota cepat atau lambat terus bertumbuh sesuai kebutuhan manusia, sementara itu kota juga merupakan hasil karya peradaban manusia yang berkembang dan bertumbuh serta menghasilkan struktur kota yang ditemui hingga saat ini.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Budihardjo (1996) Kota merupakan jejak peradaban yang ditampilkan sepanjang sejarah, perwujudan struktur perkotaan merupakan akibat dari berbagai kegiatan masyarakat sehingga kota mencerminkan simbol Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik masyarakat. Todaro (2000) mengatakan bahwa kondisi geografi merupakan penentu berdirinya sebuah kota yang akan menentukan bentuk fisik, fungsi dan karakter kota. Bintarto (1986) proses perkembangan kota tergantung pada kondisi alam dan sumberdaya binaan yang berada pada daerah perkotaan dan sekitarnya yang membawa akibat terhadap perubahan peruntukan guna lahan baik struktur maupun polanya. Sementara itu menurut wongso (2001)

menyebutkan bahwa perkembangan struktur fisik kota bisa dilihat pada elemen fisik yakni sarana transportasi, pasar, pusat pemerintahan, ruang terbuka, pusat peribatan, tempat permukiman dan non fisik adalah aktivitas manusia.

Masalah yang sering ditemui dalam perkembangan perkotaan yakni alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan Lisdiyono (2004). Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya Khadiyanto, (2005). Sedangkan lahan itu sendiri bersifat terbatas dan tidak bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi Sujarto dalam Untoro, (2006).

Perjalanan peradaban manusia berbagai macam sejarah, maka dari itu hiruk pikuk politik nasional menjadikan peristiwa bersejarah terus hidup, kejadian demi kejadian terus berlangsung, Revolusi Indonesia, gejala Politik Nasional salah satunya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia/PKI atau disingkat G30S PKI. Pembantaian massal hingga pengasingan dipelosok Negeri, salah satu buktinya terjadi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Pada tanggal 17 Agustus Tahun 1969, 800an orang dikirim ke Pulau Buru dari pelabuhan Sodong, Nusakembangan dengan menggunakan kapal perang ALRI. Pengiriman dilakukan bertahap antara lain pada bulan Agustus Tahun 1969 sebanyak 850 orang, pada bulan Desember Tahun 1969 sebanyak 1.600 orang dan pada Tahun 1970 sebanyak 5.000 orang, yang dimulai sejak bulan Juli, bulan

Agustus, dan bulan September. Setelah itu untuk menjadikan Pulau Buru sebagai permukiman maka dilangsungkan pengiriman keluarga para tahanan ke Pulau Buru pada Tahun 1972 diantaranya 164 orang yang merupakan Istri dari pada tahan politik, 485 orang anak anak dan tiga orang ibu, Jumlah keseluruhan yang dikirim menjadi 10.652 orang. Para tahanan politik pada awal pembuangan dipaksa membuka lahan pertanian dengan alat seadanya yang pada akhirnya penanaman padi berkembang menjadi kawasan persawahan di Provinsi Maluku yang memiliki daerah cenderung gersang, penanaman sawah tersebut berhasil menghasilkan panen sebesar 80ton pada awal masa pembuangan, hingga kini lumbung padi terbesar nomor dua skala Nasional berada dilokasi para tahanan politik. Tati Haryati, (2018). Pengiriman tahanan politik tanpa sepengetahuan mereka, dilakukan secara rahasia. Maka pada penelitian kali ini penulis ingin mengidentifikasi proses perubahan ruang yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 1969 sampai Tahun 1972 yang terjadi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Serta faktor faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan kondisi awal sebelum pembuangan, kawasan atau lokasi pembuangan merupakan daerah hutan belantara, sampai terjadinya pembuangan Tahanan Politik barulah memiliki dampak yang dihasilkan dari peristiwa tersebut, tentu Pulau Buru merupakan agenda besar yang perlu diperhatikan dalam aspek perkembangan penggunaan lahan sampai proses produksi pertanian akan perlu persiapan yang baik untuk memenuhi kriteria produksi baik skala Nasional maupun lokal, sebab Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan, sehingga aksesibilitas transportasi yang belum memadai menjadi satu kendala,

Inpor maupun Ekspor adalah masalah utama yang dihadapi, juga bagaimana mendapatkan bibit hingga cara mengelola dengan kondisi alam yang panas dan gersang sampai menghasilkan padi dengan skala besar, selain itu hingga saat ini proses membuka lahan yang dilakukan oleh tahanan politik yang awalnya hutan belantara masih dipertanyakan kepemilikan lahannya. Kepemilikan tanah yang ditempati tahanan politik tersebut merupakan masalah yang perlu diperhatikan pula, namun diluar kepemilikan lahan yang masih dipertanyakan tahanan politik memberikan kontribusi besar dalam membangun Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Adapun beberapa poin yang menjadi pertanyaan antara lain yaitu:

- Seperti apa pemanfaatan lahan yang terbentuk oleh tahanan politik, apakah telah sesuai dengan aturan penggunaan lahan?
- Bagaimanakah proses awal pembukaan lahan, serta apa saja kendala yang terjadi selama pengasingan?
- Bagaimana kondisi awal sebelum pembungan serta faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan oleh tahanan politik?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi perubahan spasial ruang serta periodisasi perkembangan ruang tahanan politik di Kecamatan Waerebo Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, menumbuhkan kesadaran dari informasi yang diberikan berupa penelitian yang dilakukan serta

mengidentifikasi perubahan ruang juga faktor faktor yang mempengaruhinya, termasuk poin poin berikut:

1. Mengetahui proses perubahan ruang ruang parsial, dari kurun waktu 1969 sampai 1979 .
2. Kondisi eksisiting yang dibentuk oleh para Tahanan Politik selama berada di Pulau Buru.
3. Melihat perubahan penggunaan lahan apa saja yang terbentuk pasca pengasingan di Pulau Buru.

1.4 Ruang lingkup penelitian

Pada pembahasan ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua yakni ruang lingkup materi dan ruang lingkup lokasi antara lain:

1. Ruang lingkup materi.

Materi penelitian ini berisi tentang uraian periodesasi pembentukan ruang juga latar belakang pengasingan yang nantinya membentuk ruang baru di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Adapun terdapat proses analisis perubahan parsial serta aspek aspek apa saja yang mempengaruhi tiap periode perubahannya.

2. Ruang lingkup waktu

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini meliputi masa sebelum pengasingan akhir Tahun 1969, pengasingan pada Tahun 1970 hingga Tahun 1979 dan setelah pengasingan Tahun 1979 sampai sekarang.

3. Ruang lingkup lokasi

Lokasi penelitian berada pada Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Secara geografis Kabupaten Buru terletak antara 2°25' – 3°83' Lintang Selatan dan 125°08' – 127°20' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Buru menjadi 7.595,58 Km² yang terdiri dari luas daratan 5.577,48 Km² dan luas lautan/perairan 1.972,50 Km² dengan panjang garis pantai 232,18 Km². Iklim yang berlaku di Kabupaten Buru yaitu Low Tropis yang dipengaruhi oleh angin musim serta berhubungan erat dengan lautan yang mengelilinginya. Secara administrasi Pulau Buru terdiri atas Kabupaten Buru yang memiliki Ibu Kota Kabupaten adalah Kota Namlea dan Kabupaten Buru Selatan yang memiliki Ibu Kota Namrole. Secara Geografis Kabupaten Buru memiliki batas wilayah :

- Sebelah Utara: Laut Seram
- Sebelah Selatan : Kabupaten Buru Selatan dan Laut Banda
- Sebelah Barat : Buru Selatan dan Laut Banda
- Sebelah Timur : Selat Manipa

1.5 Keluaran Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan ruang yang terjadi akibat pembuangan tahanan politik serta faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan ruang yang ada di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Untuk mengidentifikasi perubahan lahan yang terjadi akibat dari pengasingan tahanan politik, serta faktor apa saja yang

mempengaruhi perubahan ruang tersebut maka keluaran yang diinginkan oleh peneliti antara lain yaitu :

- a. Peneliti dapat mengembangkan menggunakan pendekatan meping untuk menggambarkan periodisasi perubahan ruang di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
- b. Memperoleh data perubahan eksisting dalam kurun waktu sebelum pembuangan hingga terjadinya pembuangan sampai sekarang.
- c. Mengidentifikasi bentuk struktur ruang yang dibentuk oleh masyarakat tahanan politik.
- d. Memperoleh data berupa faktor faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan eksisting khususnya Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada masa pembuangan.
- e. Menjadi produk catatan historis, perspektif perubahan serta pemanfaatan ruang.

Dari pemaparan keluaran diatas diharapkan dapat membantu mengubah paradigma masyarakat umumnya yang sering melihat para tahanan politik secara cacat, hanya dikarenakan jejak sejarah yang berjalan tidak begitu baik menurut pandangan masyarakat pada umumnya.

1.6 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang manfaat apa yang didapat oleh penulis setelah terselesaikannya

penelitian, kegunaan penelitian ini terbagi atas kegunaan bagi peneliti, kegunaan bagi masyarakat dan kegunaan bagi pemerintah. Agar lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1.6.1 Kegunaan bagi peneliti

Penelitian ini diangkat atas permasalahan yang ada dan telah dikaji oleh peneliti dalam hal proses perubahan ruang serta faktor yang mempengaruhi perubahan ruang yang dibentuk oleh tahanan politik maka peneliti harapannya mampu menemukan informasi terkait aktifitas tahanan politik serta bagaimana mereka membangun sebuah Desa yang nantinya berkembang menjadi Kecamatan paling produktif di Kabupaten Buru yang memiliki lumbung padi terbesar nomor dua di Indonesia. Sehingga kegunaan penelitian bagi peneliti pada penelitian ini yaitu:

1. Memberikan kesempatan bagi peneliti dalam mengembangkan dan meningkatkan bidang keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota dalam penerapannya berupa karya ilmiah, selain itu menjadi syarat dan ketentuan bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir pada masa perkuliahan.

2. Mengetahui sebaran tahanan politik di Pulau Buru khususnya Kecamatan Waeapo, hingga sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia salah satunya orang-orang buangan Pulau Buru.
3. Memeroleh kesempatan dalam memberikan informasi dan gambaran terkait tahanan politik dalam perspektif penataan ruang.
4. Menambah khazanah pengetahuan bagi peneliti serta menambah pengalaman dalam mengamati secara langsung kehidupan tahanan politik yang ada di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

1.6.2 Kegunaan Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat kepada pemerintah untuk pengembangan daerah khususnya aspek ekonomi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang harapan kedepannya menjadi lebih baik, serta mencoba mengupas fakta terkait kegagalan Negara dalam hal memperlakukan warga negaranya sebagai tahanan politik, tidak melihat lebih jauh khususnya soal pelanggaran Hak Asasi Manusia, tetapi manfaat yang diberikan oleh para tahanan politik ini dalam hal

pemanfaatan, pengendalian serta kontrol terhadap ruang yang dimanfaatkan, serta menyediakan informasi perspektif dampak baik yang terjadi pada peristiwa pengasingan tahanan politik di Pulau Buru, Maluku.

1.6.3 Kegunaan Akademik

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan referensi, menambah khazanah pengetahuan, juga kepada pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, untuk mengetahui tahapan penelitian serta menjadi bahan acuan dalam pemenuhan penulisan tugas akhir yang akan datang, serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

1.6.4 Kegunaan Bagi Masyarakat

Masyarakat sering melihat tahanan politik sebagai suatu kelas sosial yang memiliki kecacatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hukum sosial berlaku bagi masyarakat bekas tahanan politik, maka penelitian ini harapannya mampu merubah persepsi masyarakat umum tentang tahanan politik yang dianggap tidak se-Ideologi Politik dengan Kekuasaan namun sebenarnya memberikan sumbangsi kehidupan yang baik dalam proses pembentukan ruang hingga proses pemanfaatan lahan tepatnya di Negeri para Raja Maluku.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian terdiri dari empat bab dan beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang yang menjadi acuan penulisan juga pengembangan penelitian berupa masalah, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup materi, kerangka pemikiran dan sistematika pemikiran.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Yang menjelaskan tentang teori-teori yang di gunakan dan dianggap relevan dengan ruang lingkup masalah penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode yang di gunakan untuk menganalisis data yang telah di peroleh.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisi tentang kondisi eksisting pada lokasi penelitian

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di jelaskan tentang hasil analisa pada penelitian ini

BAB VI: PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan di bahas tentang saran serta rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan.

1.8 Kerangka Berfikir

Rumusan Masalah

- Seperti apa pemanfaatan lahan yang terbentuk oleh tahanan politik, apakah telah sesuai dengan aturan penggunaan lahan?
- Bagaimanakah proses awal pebukaan lahan, serta apa saja kendala yang terjadi selama pengasingan?
- Bagaimana kondisi awal sebelum pembungan serta faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan oleh tahanan politik?

Latar Belakang

Perubahan wilayah adalah dampak dari gerak sosial, gerak sosial itu sendiri membentuk ruang ruang baru secara alamiah dari hasil interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga interaksi tidak terlepas dari aktivitas manusia.

Dalam kehidupan bernegara tentu politik merupakan unsur terpenting, sebab berdirinya sebuah Negara adalah hasil dari revolusi politik dan manusia adalah hewan politik (Aristoteles''La Politica''cetakan visimedia 2007). Sementara itu menurut (Aristoteles''La Politica''cetakan visimedia 2007), politik berasal dari kata polis yaitu kota atau perkumpulan mencapai kemaslahatan bersama.

Masalah yang sering di temui dalam perkembangan perkotaan yakni alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan Lisdiyono (2004). Sedangkan lahan itu sendiri bersifat terbatas dan tidak bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi Sujarto dalam Untoro, (2006). Revolusi Indonesia, gejala Politik Nasional salah satunya gerakan 30 September (G30S) Partai Komunis Indonesia/PKI atau di singkat G30S PKI. Pembantaian masal hingga pengasingan di pelosok negeri, salah satu buktinya terjadi di Kecamatan Waerebo Kabupaten Buru Maluku.

